





## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Nailis Sa'adah  
NIM : E04207016  
Fak : Ushuluddin  
Prodi : Politik Islam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Partisipasi Politik Pondok Pesantren Sunan Drajat Dalam Pemilihan Bupati Lamongan Tahun 2010**" adalah hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukan plagiat. Apabila dikemudian hari diketahui kepalsuannya, kami bersedia untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Surabaya, 31 Januari 2011



*Nailis Sa'adah*  
NAILIS SA'ADAH















merupakan modal sosial bagi tiap agenda politik nasional. Namun, tanpa agenda yang jelas, modal sosial tidak otomatis bisa digerakkan bagi tujuan-tujuan politik praktis, selain bisa berakibat runtuhnya pilar masyarakat madani.

Keterlibatan elite NU dan Muhammadiyah dalam pilpres segera mengundang perdebatan internal dalam hubungannya dengan kegiatan politik praktis. Kekalahan partai berbasis NU (PKB) dan Muhammadiyah (PAN) dalam pemilu legislatif, serta kegagalan kedua organisasi Islam terbesar di Indonesia itu dalam pilpres, merupakan pendidikan politik. Politik santri yang normatif dan berbasis teologi mulai dikoreksi sosiologi politik yang lebih empiris dan realistik.

Penempatan komunitas Muslim sebagai mayoritas penduduk, jutaan warga NU dan Muhammadiyah sebagai kekuatan politik riil, disadari sebagai pandangan semu. Disadari, bahwa kultur keagamaan merupakan modal sosial yang bisa digerakkan untuk politik praktis jika dikembangkan komunikasi pragmatis bagi kepentingan mayoritas rakyat. Model komunikasi politik inilah yang mengantar para aktor demokrasi yang tak memiliki basis organisasional dalam gerakan Islam ke puncak kekuasaan.

Kesadaran politik itu mendorong elite santri memperhitungkan kembali peran politik yang bisa dimainkan bagi tujuan politik praktis. Kegiatan politik praktis lebih menarik karena hasilnya terukur dan segera bisa dinikmati. Berbagai kebijakan politik pada tingkat nasional atau daerah segera bisa dibuat pemerintah bersama DPR dan DPRD yang mengikat semua warga dan fasilitas hidup yang







bantuannya. *Ketiga*, Kyai politik yaitu pengasuh pondok pesantren yang senantiasa peduli pada organisasi politik dan juga pada kekuasaan. *Keempat*, kyai politik mitra kritis mirip dengan Kyai spiritual, tetapi ia memperhatikan dunia politik, dekat dengan umat, meletakkan kehidupan dunia dan akhirat secara seimbang.

Salah satu pondok pesantren yang peneliti amati adalah pondok pesantren Sunan Drajad desa Banjaranyar, kecamatan Paciran, kabupaten Lamongan. Karena pondok pesantren Sunan Drajad ini kyai-Nya memberikan tawaran yang sesuai dengan tipologi kyai politik mitra kritis. Pondok pesantren ini juga pada waktu pilpres memberikan dukungan atau partisipasi politik yang berupa dukungan suara secara langsung dengan mendukung pasangan Megawati-Prabowo.

Dari pengalaman pilpres, maka pada saat pilbup Lamongan tahun 2010 pondok pesantren Sunan Drajad ini menjadi tempat startegis bagi para calon Bupati untuk berpartisipasi politik baik secara langsung, dalam artian memberi suara secara langsung dalam pemilihan Bupati. Ataupun partisipasi politik yang hanya mengkampanyekan calon Bupati tertentu.

Dari pemaparan di atas, maka peneliti tertarik kemudian memfokuskan pondok pesantren Sunan Drajad ini menjadi objek penelitian. Karena Pondok pesantren Sunan Drajad ini memiliki ciri khas selain pondok pesantren yang berbasis NU, kegiatan dalam pondok pesantren ini juga masih kental sama halnya







menjadi perhatian pesantren dewasa ini dan berbagai transformasi yang mungkin dilakukan secara strategis. Selain upaya-upaya pemberdayaan menyangkut kebutuhan real masyarakat, buku ini juga menggambarkan dimensi-dimensi pemikiran yang kiranya bisa direkonstruksi, terutama dalam paradigma keilmuan, tradisi kajian kitab kuning, metode pengajaran, dan pola-pola budaya pesantren.

2. Buku karangan Abdul Munir Mul Khan. 1994. *Runtuhnya Mitos Politik Santri*. Sippres: Yogyakarta. Buku ini menjelaskan bahwa kajian paling unik mengenai umat Islam dalam hubungannya dengan masalah social tidak terletak pada jumlahnya sebagai mayoritas, akan tetapi terletak pada kegagalan ilmunan, politisi penguasa, bahkan pemimpinnya sendiri untuk menempatkannya sebagai suatu realitas dan kekuatan social, politik bahkan budaya.
3. Buku karangan Abdul Munir Mul Khan. 2009. *Politik Santri: Cara Menang Merebut Hati rakyat*. Kanisius: Yogyakarta. Buku ini menggambarkan bahwa partai kaum santri hampir selalu gagal merebut simpati rakyat meski jumlah kuantitatif pemeluk Islam adalah mayoritas penduduk di negeri ini.
4. Buku karangan Sukamto. 1999. *Kepemimpinan Kiai dalam Pesantren*. LP3ES: Jakarta. Buku ini menjelaskan peran Kyai selain merupakan salah satu unsur dasar yang membentuk lembaga pondok pesantren, juga berada pada posisi sentral dalam komunitas pesantren, karena ia dianggap sebagai pemilik,

pengelola, pengajar kitab kuning, sekaligus sebagai pemimpin. Ini berarti bahwa tradisi keagamaan pesantren yang berkembang dalam komunitas itu telah mampu membangun subkulturnya sendiri, yang cenderung terkesan tertutup dan eksklusif. Padahal pesantren merupakan bagian integral dari kultur masyarakat sekitarnya termasuk sistem pendidikan yang berlaku di dalamnya.

5. Buku karangan Syafiq Hasyim, dkk. 2010. *Nahdlatul Ulama: Dinamika Ideologi dan Politik Kenegaraan*. Kompas: Jakarta. Buku ini menjelaskan persoalan yang dihadapi oleh NU dalam kehidupan sosial, keagamaan, dan politik. Godaan politik praktis membayangi para elitnya. Melalui muktamar tahun 2010, NU berusaha melakukan refleksi atas peran yang telah dimainkan selama lima tahun sebelumnya dan mengagendakan perbaikan umat (kader dan jemaah) dalam konteks kebangsaan.
6. Buku karangan Pahmi Sy. 2010. *Politik Pencitraan*. GP Press: Jakarta. Politik pencitraan muncul sebagai akibat pesatnya arus informasi dan diberikannya hak-hak masyarakat untuk dapat memilih secara langsung pimpinan nasional dan daerah maupun wakil-wakilnya di lembaga legislatif secara langsung dengan sistem terbuka, apalagi dengan suara terbanyak.
7. Buku karangan Ramlan Surbakti. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Gramedia Widiasarana: Jakarta. Buku ini membahas konsep-konsep dasar ilmu politik dan mendeskripsikan atas sejumlah konsep penting dalam ilmu politik. Selain











### 3. Menarik kesimpulan

Menarik kesimpulan dilakukakn berdasarkan reduksi, intrepretasi penyajian data yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya. Selaras dengan mekanisme logika pemikiran induktif, maka penarikan kesimpulan akan bertolak dari hal-hal yang khusus sampai pada rumusan simpulan yang sifatnya umum.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk memberikan sistematika pembahasan yang jelas, maka dalam skripsi ini penulis mencoba menguraikan isi kajian pembahasan. Adapun sistematika pembahasan skripsi ini terdiri dari lima bab dengan uraian sebagai berikut:

**BAB I** : Pendahuluan, terdiri dari; Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Definisi Operasional, Telaah Kepustakaan, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

**BAB II** : Kerangka Konseptual dan Teoritik, terdiri dari; Konsep kyai, konsep santri, konsep pondok pesantren, definisi konsep partisipasi politik. Menjelaskan teori otoritas Max Weber dan teori hegemoni Antonio Gramsci sebagai gambaran partisipasi politik pondok pesantren.

- BAB III : Setting penelitian, terdiri dari; Profil pondok pesantren Sunan Drajad serta Partisipasi politik pondok pesantren Sunan Drajad dalam pemilihan Bupati Lamongan tahun 2010.
- BAB IV : Analisa data yang meliputi; Analisa partisipasi politik pondok pesantren Sunan Drajad dalam pemilihan Bupati Lamongan tahun 2010 dan Analisa peran kyai dalam mendorong partisipasi politik santri pondok pesantren Sunan Drajad pada pemilihan Bupati Lamongan tahun 2010.
- BAB V : Kesimpulan dan Saran.







pesantren. Karena posisi santri seperti ini, maka kedudukan dalam komunitas pesantren menempati status sosial subordinat, sedangkan Kyai menempati posisi superordinat.

Sementara pendapat lain menurut Abdurrahman Wahid, santri adalah siswa yang tinggal di pesantren guna menyerahkan diri. Ini merupakan persyaratan mutlak untuk memungkinkan dirinya menjadi anak didik Kyai dalam arti sepenuhnya. Dengan kata lain, ia harus memperoleh kerelaan sang Kyai dengan mengikuti segenap kehendaknya dan melayani segenap kepentingannya. Pelayanan harus dianggap sebagai tugas kehormatan yang merupakan ukuran penyerahan diri itu. Kerelaan Kyai ini yang dikenal di pesantren dengan nama *barakah* adalah alasan tempat berpijak santri di dalam menuntut ilmu dengan tekanan pada kebutuhan memperoleh kerelaan Kyai inilah diciptakan dalam pembentukan tata nilai di pesantren.

Menurut Nurcholis Madjid, ada dua pendapat yang bisa dipakai sebagai acuan untuk melihat asal-usul perkataan santri. Pertama adalah pendapat yang mengatakan bahwa santri berasal dari kata *sastri* dari bahasa Sanskerta, yang artinya melek huruf. Agaknya pada masa dahulu, lebih-lebih pada permulaan tumbuhnya kekuasaan politik Islam Demak, kaum santri adalah kelas *literary* (melek huruf) bagi orang Jawa. Ini disebabkan pengetahuan mereka tentang agama melalui kitab-kitab bertulisan Arab. Dari sini dapat diasumsikan bahwa menjadi santri berarti juga menjadi tahu agama melalui kitab-kitab yang dipelajari. Atau paling tidak seorang santri bisa

















masalah tertentu tentang yang mempengaruhi kehidupan mereka. Kegiatan ini biasanya dilakukan untuk memperoleh dukungan ataupun untuk memobilisasi dukungan atau tantangan terhadap masalah-masalah tertentu yang hendak ditangani oleh pemerintah atau lembaga perwakilan rakyat.

*Organizational activity*, yaitu keterlibatan warga masyarakat ke dalam berbagai organisasi sosial dan politik, apakah itu sebagai pimpinan, aktivis, ataukah sebagai anggota biasa. Organisasi tersebut mempunyai fungsi mempengaruhi pemerintah dalam pembuatan kebijakan publik. Selanjutnya adalah *contacting*, yaitu partisipasi yang dilakukan oleh warga negara dengan secara langsung mendatangi ke tempat bertugas pemerintah ataupun tokoh politik, baik dilakukan secara individual ataupun dalam kelompok orang yang sangat kecil jumlahnya. Biasanya, bentuk partisipasi seperti ini akan mendatangkan manfaat bagi orang yang melakukan partisipasi tersebut.

Dan bentuk partisipasi yang terakhir menurut Affan Ghaffar yaitu *violence*. *Violence* merupakan cara-cara kekerasan untuk mempengaruhi pemerintah juga dapat dimasukkan ke dalam kategori partisipasi politik, hanya saja cara yang ditempuh untuk mempengaruhi pemerintah dengan melakukan pengrusakan terhadap barang ataupun individu.

Sementara itu, Milbrath dan Goel membedakan partisipasi menjadi beberapa kategori. *Pertama*, apatis. Artinya orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik. *Kedua*, spektator. Artinya orang yang setidaknya-tidaknyanya pernah ikut memilih dalam pemilihan umum. *Ketiga*,













lingkungan sosial politik langsung seorang aktor mengalami sosialisasi dan internalisasi nilai dan norma masyarakat, termasuk nilai dan norma kehidupan bernegara, dan pengalaman-pengalaman hidup pada umumnya. Lingkungan langsung ini dipengaruhi dengan lingkungan tak langsung.

*Ketiga*, struktur kepribadian yang tercermin dalam sikap individu. Untuk memahami struktur kepribadian perlu dicatat bahwa terdapat tiga basis fungsional sikap, yaitu kepentingan, penyesuaian diri, eksternalisasi dan pertahanan diri. Basis yang pertama merupakan sikap yang menjadi fungsi kepentingan. Artinya, penilaian seseorang terhadap suatu objek ditentukan oleh minat dan kebutuhan atas objek tersebut. Basis yang kedua merupakan sikap yang menjadi sikap yang menjadi fungsi penyesuaian diri. Artinya, penilaian terhadap suatu objek dipengaruhi oleh keinginan untuk sesuai atau selaras dengan objek tersebut. Basis yang ketiga merupakan sikap yang menjadi fungsi eksternalisasi diri dan pertahanan diri. Artinya, penilaian seseorang terhadap suatu objek dipengaruhi oleh keinginan untuk mengatasi konflik batin atau tekanan psikis yang mungkin berwujud mekanisme pertahanan diri dan eksternalisasi diri, seperti proyeksi, idealisasi, rasionalisasi, dan identifikasi dengan *aggressor*.

*Keempat*, faktor lingkungan sosial politik langsung berupa situasi, yaitu keadaan yang mempengaruhi aktor secara langsung ketika hendak melakukan suatu kegiatan, seperti cuaca, keadaan keluarga, keadaan ruang, kehadiran orang lain, suasana kelompok, dan ancaman dengan segala bentuk.







## B. Relasi Santri, Kyai, dan Politik dalam Perspektif Teoritik

### 1. Teori hegemoni (Antonio Gramsci)

Antonio Gramsci, seorang *Italian* (1891-1937), merupakan pemikir Neo-Marxist terkenal. Gramsci telah menulis karya-karya yang terkenal. Pada umumnya karya-karya Gramsci terbagi dua. *Pertama*, pemikirannya pada saat aktif berpolitik yang tersebar di berbagai media. *Kedua*, lebih dari tiga puluh *notebooks* yang berisi sejarah dan analisisnya selama di penjara. Tulisannya ini dikenal dengan nama *Prison Notebooks*, yang berisi sejarah Italia dan nasionalisme, juga idenya dalam teori kritis dan pemikiran tentang pendidikan. *Pertama*, hegemoni kultural. *Kedua*, perlunya pendidikan untuk kelas pekerja dalam mengembangkan lahirnya cendekiawan dari kelas pekerja.

Hegemoni kultural Gramsci berusaha untuk menjelaskan, mengapa prediksi atas adanya revolusi komunis dalam era industri di Eropa tidak pernah terjadi. Resesi dan sejumlah kontradiksi atas kapitalisme tersebut akan menyebabkan berlimpahnya massa, yakni orang-orang dari kelas pekerja untuk mengembangkan organisasi seperti serikat buruh dan partai politik sebagai langkah pembelaan diri. Resesi dan kontradiksi yang berkelanjutan tersebut akan menggulingkan kapitalisme dalam suatu revolusi dan merestrukturisasi institusi ekonomi, politik, dan sosial dalam model sosialis-rasional yang kelak akan melahirkan masyarakat komunis.







Dalam hal ini, Gramsci menyatakan bahwa kelas yang berkuasa menggunakan dua cara umum dalam melakukan kontrol sosial. *Pertama, coercive control* dimanifestasikan melalui paksaan langsung atau ancaman. (umumnya diperlukan jika derajat kepemimpinan hegemoni terlalu rendah atau retak). *Kedua, consensual control* akan timbul ketika individu secara sukarela menerima perspektif dari kelas dominan (disebut juga kepemimpinan hegemoni).

Cara untuk menumbangkan hegemoni yang dominan, tidak hanya berupa kekerasan saja, namun juga berupa aktivitas politik. Gramsci mengusulkan dua bentuk strategi politik dalam mencapai garis besar dari hegemoni yang berkuasa dan pembentukan masyarakat sosialis:

- a. *War of Manoeuvre*: Karakteristiknya adalah serangan yang frontal, bertujuan untuk meraih kemenangan secara cepat, dan khususnya ditujukan kepada masyarakat dengan kekuasaan negara yang dominan dan terpusat serta gagal dalam membangun hegemoni yang kuat dalam *civil society*.
- b. *War of Position*: Karakteristiknya adalah perjuangan yang panjang. Pertama menyangkut institusi dari suatu *civil society*, kedua kaum sosialis mengambil kendali melalui perjuangan kultural dan ideologis dibandingkan persaingan ekonomi dan politik, ditujukan khususnya untuk masyarakat liberal-demokratis dengan kekuatan negara yang lemah, namun hegemoni yang lebih kuat.





Menurut Webber tipe ideal birokrasi itu mempunyai suatu bentuk yang pasti dimana semua fungsi dijalankan dalam cara-cara yang rasional. Istilah rasional dengan segala aspek pemahamannya merupakan kunci dari konsep ideal birokrasi Weberian. Rasionalitas dan efisiensi dicerminkan dengan susunan hierarki adalah khusus merupakan kebutuhan yang amat mendesak pada saat itu. Dengan demikian ukuran rasionalitas dan efisiensi amat berbeda dengan kriteria untuk organisasi zaman modern sekarang ini yang kondisinya tidak sama dengan zamannya Max Webber.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Miftah Thoha, *Birokrasi dan Politik di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2005), 19



orang yang disebut dengan nama santri yang dengan tekun mempelajari dan mengkaji Al-Qur'an, Hadits, dan kitab-kitab lain dalam jangka waktu yang cukup lama.

Lokasi Pondok Pesantren Sunan Drajat berada di desa Banjarwati, kecamatan Paciran, kabupaten Lamongan. Menilik dari namanya, memang Pondok Pesantren ini mempunyai ikatan historis, psikologis dan filosofis yang sangat lekat dengan nama Kanjeng Sunan Drajat. Sunan Drajat adalah julukan dari Raden Qosim putra kedua dari Raden Ali Rahmatullah (Sunan Ampel) dengan Nyi Ageng Manila (putri Arya Teja, Adipati Tuban). Pada sekitar tahun 1440-an, Syahdan seorang pelaut muslim asal Banjarmasin, Kalimantan Timur mengalami musibah di pesisir pantai utara. Kapal yang ditumpanginya pecah terbentur batu karang dan kapal itu pun karam. Sang pelaut muslim asal Banjar (Banjarmasin, Kalimantan Timur) mengalami musibah di pesisir pantai utara. Kapal yang ditumpanginya pecah terbentur batu karang kapal dan kapal itupun karam. Sang pelaut muslim terdampar di tepian pantai Jelag (sebuah dusun disebelah utara Banjaranyar paciran lamongan) dan ditolong oleh mbah Mayang Madu, penguasa kampung Jelag saat itu. Selanjutnya sang pelaut muslim untuk sementara tinggal bersama mbah Mayang Madu dimana kondisi masyarakat pada waktu itu sangat memprihatinkan. Kehidupan



menyiarkan ajaran Islam. Maka berangkatlah Raden Qosim menuju kampung Banjaranyar. Perjuangan beliau dimulai dengan mendirikan Pondok Pesantren disuatu petak tanah yang terletak sekitar 200 m dari tepian pantai Banjarnayar yang sekarang dipakai lokasi Pondok Pesantren putri Sunan Drajat. Beliau pun mengatakan bahwa barang siapa yang mau belajar dan mendalami ilmu agama ditempat tersebut, semoga Allah menjadikannya manusia yang memiliki derajat luhur. Karena doa Raden Qosim inilah para pencari ilmu berbondong-bondong belajar di tempat beliau dan Raden Qosim pun mendapat gelar Sunan Drajat. Sementara itu untuk mengenang perjuangan mbah Banjar maka dusun yang sebelumnya bernama kampung Jelag diganti namanya menjadi Banjaranyar karena mengabadikan nama mbah Banjar dan anyar sebagai suasana baru sebagai petunjuk Islam. Setelah beberapa lama beliau berdakwah di Banjaranyar maka mengembangkan Daerah dakwahnya dengan mendirikan masjid dan Pondok Pesantren yang baru di kampung Sentono. Beliau berjuang hingga akhir hayatnya dan dimakamkan di belakangh masjid tersebut. Kampung di mana beliau mendirikan Pondok Pesantren dan masjid tersebut akhirnya dinamakan pula sebagai desa Drajat. Sepeninggal kanjeng Sunan Drajat tongkat estafet perjuangan diteruskan oleh anak cucu Sepeninggal



















## **B. Partisipasi Politik Pondok Pesantren Sunan Drajat dalam Pemilihan Bupati**

### **Lamongan Tahun 2010**

Pemilihan Bupati langsung merupakan salah satu faktor penting bagi upaya terciptanya kehidupan yang demokratis di Indonesia. Pemilihan bupati atau biasa dikenal dengan istilah Pemilu Kepala Daerah merupakan prosedur yang ditempuh oleh masyarakat demi mendapatkan keputusan politik, yaitu eksekutif daerah. Melalui sebuah proses pemilihan yang bersifat kompetisi di antara calon-calon yang mencalonkan diri. Proses ini dilakukan demi mencapai kesepakatan dari seluruh masyarakat yang ikut memberikan suaranya, di mana suara terbesar akan menjadi bupati dan wakil bupati. Pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah merupakan salah satu mekanisme yang tepat untuk memfasilitasi para Calon Bupati dan Wakil Bupati bersaing untuk menjadi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Sebagai bagian dari warga negara di negeri ini, partisipasi politik santri Pondok Pesantren Sunan Drajat pada pemilu Kepala Daerah Lamongan tahun 2010 merupakan satu keniscayaan. Bagaimanapun santri adalah bagian dari masyarakat yang mempunyai hak secara mutlak untuk memberikan suaranya dalam pemilu Kepala Daerah Lamongan tahun 2010 tersebut. Tabel di bawah menunjukkan bahwa jumlah santri ponpes Sunan Drajat terdaftar sebagai pemilih dalam daftar pemilih tetap pemilu Kepala Daerah:













## Suara Tidak Sah

No	Nama Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Suara
1.	Suara Tidak Sah	51
Jumlah suara sah dan tidak sah		3881

*Sumber: data berita acara rekapitulasi hasil perhitungan suara pemilu kepala daerah tahun 2010 di kelurahan Banjarwati<sup>19</sup>*

---

<sup>19</sup> PPK di kecamatan Paciran tahun 2010



dalam membuat suatu keputusan politik, namun mereka mempunyai hak untuk mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan. Partisipasi politik adalah aspek penting dalam kehidupan demokratis, di mana keputusan politik pemerintah mutlak melibatkan keikutsertaan rakyat. Partisipasi ini menjadi keharusan, bagaimanapun suatu keputusan politik pasti menyangkut dan mempengaruhi kepentingan rakyat. Arti penting sebuah partisipasi lebih karena partisipasi merupakan upaya rakyat untuk ambil bagian dalam penentuan keputusan politik, termasuk dalam proses pemilihan pemimpin, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Sebagai bagian dari warga negara Indonesia, dalam hal ini warga pondok pesantren Sunan Drajat seolah tidak mau kalah dengan keikutsertaan dalam mengambil hak mereka pada pemilu Kepala Daerah Lamongan tahun 2010. Partisipasi politik warga pesantren dipercaya bisa mempengaruhi tingkat suara yang lebih tinggi. Hal itu memang terbukti pada partisipasi politik Pondok Pesantren Sunan Drajat, di mana para santri memberikan partisipasi politiknya dalam pemilu Kepala Daerah Lamongan tahun 2010. Pada pemilu Kepala Daerah Lamongan tahun 2010 ada empat calon bupati dan wakil bupati, salah satunya adalah pasangan Tsalits Fahami-Subagio yang mendapat dukungan dari pondok pesantren Sunan Drajat.

Pada pemilu Kepala Daerah Lamongan tahun 2010 partisipasi santri sangat diperlukan oleh pasangan calon bupati dan wakil bupati tersebut untuk memperoleh suara yang tinggi. Kenyataannya, partisipasi politik santri pondok

pesantren Sunan Drajat ini memang tinggi, dibuktikan dengan adanya pemberian suara mereka dalam pemilu Kepala Daerah Lamongan tahun 2010 dan terdaftar di TPS 06 dan TPS 07 di kelurahan Banjarwati. Jumlah DPT di pondok pesantren Sunan Drajat sejumlah 1152 semua santri pun memberikan suara mereka dengan baik artinya tidak ada satu pun santri yang golput. Dari hasil penghitungan suara pun calon pasangan yang diusung pondok pesantren Sunan Drajat lebih unggul dibandingkan dengan calon pasangan bupati dan wakil bupati yang lain.

Milbrath dan Goel membedakan partisipasi menjadi beberapa kategori. *Pertama*, apatis, artinya orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik. *Kedua*, spektator, artinya orang yang setidak-tidaknya pernah ikut memilih dalam pemilihan umum. *Ketiga*, gladiator, artinya mereka yang secara aktif ikut terlibat dalam proses politik, yakni komunikator, spesialis mengadakan kontak tatap muka, aktivis partai dan pekerja kampanye, dan aktivis masyarakat.

Para Santri di Pondok Pesantren Sunan Drajat termasuk mempunyai tingkat partisipasi yang aktif, karena telah memberikan hak suara pada pemilu Kepala Daerah tahun 2010. Angka yang lebih unggul di kelurahan Banjarwati khususnya pada TPS 06 dan TPS 07 membuktikan partisipasi yang aktif. Secara teoritis santri pondok pesantren Sunan Drajat sesuai dengan tipe spektator, karena makna dalam teori ini adalah orang yang setidak-tidaknya pernah ikut memilih dalam pemilihan umum. Walaupun pada kenyataannya masih ada beberapa santri yang tidak mengerti dengan adanya politik pada umumnya, dan pemilu Kepala Daerah pada khususnya. Mereka yang kurang mengerti dengan adanya politik





*didawuhkan* oleh Kyai-nya. Hal ini sebagai bentuk pengabdian sebagai santri terhadap Kyai meskipun hak mereka dirampas secara halus untuk menerima apa yang disarankan Kyai. Di satu sisi, para santri pun juga tidak keberatan dengan apa yang telah mereka lakukan. Santri yang betul-betul *ta'dhim* kepada Kyai pasti tidak mempermasalahkannya. Mereka menganggap apa yang di instruksikan oleh Kyai pasti baik dan bermanfaat pada dirinya sendiri. Namun juga disebabkan respon politik dalam pemilu Kepala Daerah para santri Pondok Pesantren Sunan Drajat cukup reaktif. Artinya para santri cukup antusias untuk menyambut pemilu Kepala Daerah dengan suatu bentuk pemilihan yang mengedepankan aspirasi serta hak sebagai warga negara. Maka dari itulah hal yang membuat para santri terhegemoni menjadi lebih mudah. Banyak celah yang memudahkan Kyai untuk menghegemoni santri. Namun, celah tersebut tidak terlalu dipermasalahkan oleh para warga santri Pondok Pesantren Sunan Drajat.

Sebagai buktinya yaitu hasil suara calon Bupati dan calon wakil Bupati yang unggul di kelurahan Banjarwati, merupakan pasangan Tsalits Fahami-Subagio. Kedua pasangan calon ini merupakan kandidat yang diinstruksikan Kyai di Pondok Pesantren Sunan Drajat untuk dipilih. Kyai tidak dengan secara langsung memberikan intruksi kepada santrinya, namun diperantarakan lewat pengurus pondok untuk di koordinir dan disampaikan kepada para santri.



pengabdian kepada Kyainya. Dengan kata lain, seseorang yang menjadi santri harus patuh terhadap apa yang diperintahkan oleh Kyai. Dalam kasus di pondok pesantren Sunan Drajat, mereka yang dianggap Kyai ini hanyalah seorang yaitu Abdul Ghofur yang juga merupakan pengasuh utama dan mempunyai kekuasaan terbesar di Pondok Pesantren Sunan Drajat karena beliau juga masih mempunyai garis keturunan dengan Raden Qosim alias Sunan Drajat. Abdul Ghofur mempunyai karakter yang kuat, disiplin dalam mendidik santri, sehingga dapat menjadi panutan bagi semua santri. Meskipun Abdul Ghofur tidak terjun langsung dalam politik praktis, tetapi kiprahnya di dunia politik sudah tidak diragukan lagi. Beliau sering berinteraksi dengan dunia luar meskipun tujuan akhirnya sebenarnya untuk pengembangan pondok pesantren Sunan Drajat. Abdul Ghofur merupakan sosok yang kharismatik dan fenomenal, sehingga bisa mempengaruhi santri-santri di pondok pesantren Sunan Drajat khususnya dan juga masyarakat di sekitar pondok pesantren Sunan drajat pada umumnya.

Pengaruh nyata dari Abdul Ghofur memberikan dampak terhadap hasil suara dalam Pemilu Kepala Daerah Lamongan tahun 2010 yang ada di kelurahan Banjarwati. Para santri memberikan hak suaranya kepada Calon Bupati yang telah diinstruksikan oleh Abdul Ghofur. Beliau memberikan instruksi kepada santrinya dengan cara memberikan *tausiyah* dan juga meenginstruksikan kepada pengurus Pondok Pesantren Sunan Drajat untuk mengkondisikan para santri. Namun, Kyai tidak serta merta untuk mengikuti apa yang telah diinstrusikannya. Beliau tetap mengembalikan pilihan penuh kepada santrinya.













Banjarwati yang memang menjadi instruksi pengasuh. Dan dapat dikatakan angka partisipasi santri cukup tinggi karena tidak ada angka yang menunjukkan golongan putih (golput). Secara teoritik golongan putih (golput) merupakan partisipasi tidak aktif berupa tindakan masyarakat dalam pemilu. Tetapi di pondok pesantren Sunan Drajat memberikan partisipasi politik yang cukup baik dalam mengapresiasi bentuk partisipasi mereka dengan memberikan suara langsung dalam pemilu Kepala Daerah Lamongan tahun 2010.





agama Islam, berilmu pengetahuan agama yang tinggi, kesholihannya dan tingkah sopan lakunya yang membuat masyarakat menjadi segan kepada beliau. Khususnya kepada santri yang harus patuh dan taat kepada Kyai-nya agar mendapat berkah dikemudian hari. Pengaruh kultural dan kekharismanan dari Abdul Ghofur inilah yang membuat para santri menyatakan satu pilihan calon pasangan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan tahun 2010 sesuai dengan yang di *dawuhkan* oleh beliau.

## **B. Saran**

1. Adapun saran dalam penelitian ini ialah bahwasannya sebagai warga negara Indonesia haruslah selalu menjunjung tinggi rasa demokrasi, khususnya dalam hal pemilihan umum untuk menentukan seorang pemimpin. Demokrasi merupakan harga mahal yang harus dituangkan dalam hak asasi sebagai warga negara Indonesia. Jangan sampai pengaruh luar ikut menggerus mental dan idealisme kita dalam menentukan hak suara.
2. Mengidolakan seorang tokoh merupakan sesuatu yang tidak dilarang. Jika tokoh tersebut juga ikut dalam peran politik untuk mengajak kepada satu kesefahaman dengan dirinya. Alangkah baik dan bijaknya jika kita yang mengikutinya juga berusaha untuk memahami dan mengetahui sendiri lebih dalam lagi. Jadi, tidak hanya sekedar mengikuti saja tanpa adanya background yang jelas di mata kita. Hal ini diperlukan untuk menumbuhkan kedewasaan berfikir politik sebelum membuat keputusan.



